

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Sebagai identifikasi awal, rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sehingga dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri. Pemerintah pada tahun 2003 mulai melakukan reformasi dibidang keuangan yang ditandai dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan , dengan harapan system pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien

dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Undang-Undang mengenai Keuangan Negara dimana di dalamnya terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada wakil presiden di daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri.

Pengelolaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah diawali dengan diberlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah di beri kebebasan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mengelola rumah tangga atau daerahnya sendiri, maka penyelenggaraan otonomi daerah merupakan awal bagi pemerintah daerah untuk mulai mengkonsentrasikan diri terhadap proses pembangunan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan serta pembangunan yang secara umum ditandai dengan penyelenggaraan pembangunan disertai pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya dalam pengelolaan keuangan disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penatausahaannya di pegang oleh satu orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran dan dibantu oleh beberapa orang pembantu bendahara, yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Prosedur Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Oleh Karena itu penulis memilih judul “ **Prosedur Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ?

1.3. Tujuan Magang

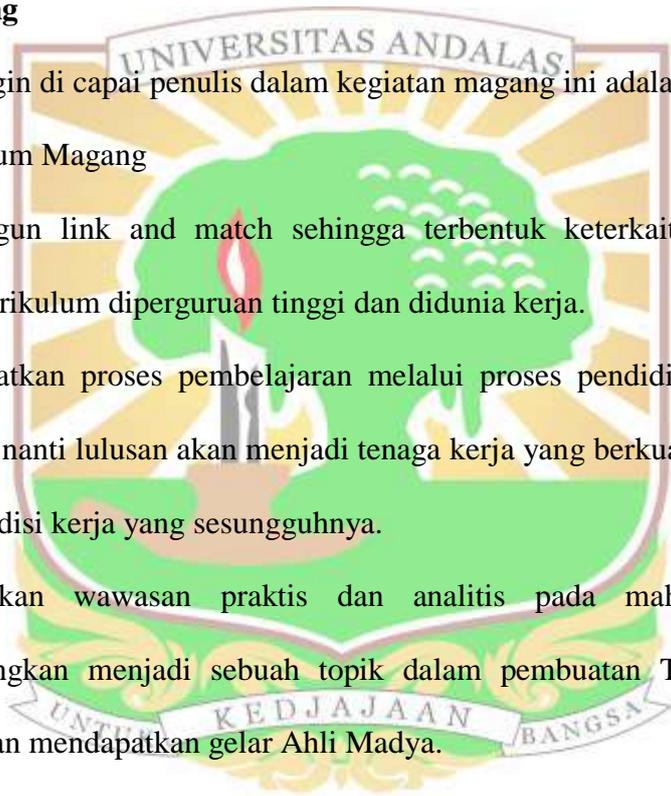
Tujuan yang ingin di capai penulis dalam kegiatan magang ini adalah :

A. Tujuan Umum Magang

1. Membangun link and match sehingga terbentuk keterkaitan dan kesepakatan antara kurikulum diperguruan tinggi dan didunia kerja.
2. Meningkatkan proses pembelajaran melalui proses pendidikan berbasis praktik sehingga nanti lulusan akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan propesional pada kondisi kerja yang sesungguhnya.
3. Memberikan wawasan praktis dan analitis pada mahasiswa yang akan dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai penyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya.

B. Tujuan Khusus Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan anggaran SKPD pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.



1.4. Manfaat Magang

Manfaat dari kegiatan magang yaitu :

A. Manfaat bagi mahasiswa

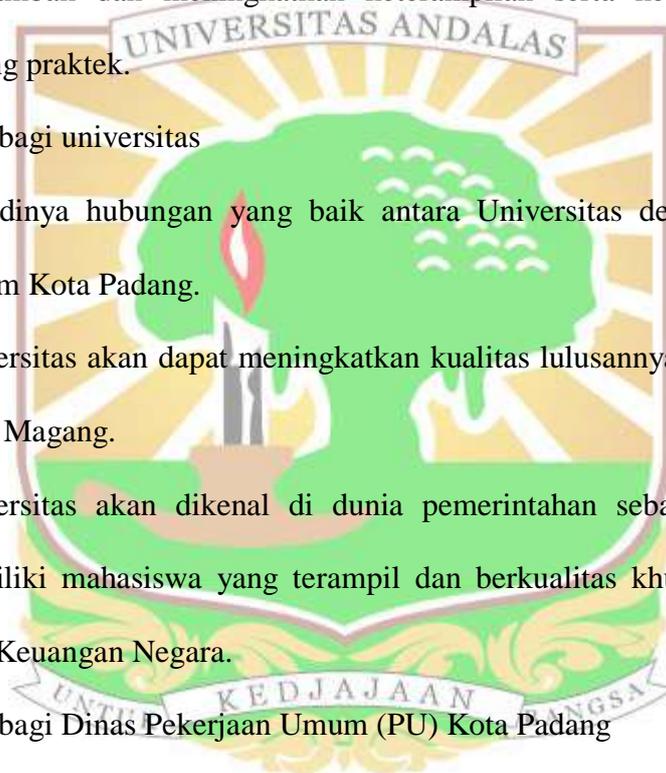
1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
2. Menambah wawasan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana dunia pekerja yang sesungguhnya dilapangan.
3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian mahasiswa di bidang praktek.

B. Manfaat bagi universitas

1. Terjadinya hubungan yang baik antara Universitas dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
2. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja Magang.
3. Universitas akan dikenal di dunia pemerintahan sebagai universitas yang memiliki mahasiswa yang terampil dan berkualitas khususnya pada jurusan DIII Keuangan Negara.

C. Manfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang

1. Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia pemerintahan membuat dinas tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
2. Adanya kritikan – kritikan yang membangun dari mahasiswa – mahasiswa yang melakukan praktek magang menjadi suatu masukan bagi dinas tersebut.
3. Dinas akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa – mahasiswa yang melakukan praktek.



1.5. Sistematika Penulis

Penulisan laporan magang ini terdiri dari V bab yang mana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan anggaran SKPD pada bendahara pengeluaran.

Bab III Gambaran Umum Instansi

Dalam bab ini membahas gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab.

Bab IV Prosedur Pelaksanaan Anggaran SKPD Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

Merupakan pembahasan prosedur pelaksanaan anggaran pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang dan bagaimana pertanggung jawabannya.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan.

